

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 -2021

Oleh

Muhammad Rivandi¹, Yeyen Anggraini²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Email: muhammadrivandi@akbpstie.ac.id, yeyen.anggraini81@gmail.com

Abstract

This study aims to see the effect of the influence of regional original income and capital expenditure on regional financial independence in districts/cities in the province of West Sumatra. This study has a population of 19 regencies and cities in the province of West Sumatra. This study uses the Total Sampling technique. The data used is secondary data obtained from www.djpk.kemenkeu.go.id. The method used in this study is multiple regression of panel data with the help of the E-Views 10 program. The results of this study indicate that the Regional Original Income variable has a significant positive effect on Regional Financial Independence partially. Then, the Capital Expenditure variable has a significant positive effect on Regional Financial Independence partially.

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, Regional Financial Independence

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah adalah perwujudan dari sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu adanya perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat (Utami, 2018).

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan hampir mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri apabila tingkat kemandirian yang dihasilkan > 50%, namun faktanya, di

Indonesia masih sangat sedikit pemerintah daerah yang termasuk kedalam kategori mandiri secara keuangan. Berdasarkan hasil review BPK RI tahun 2020, sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah masuk kedalam kategori belum mandiri (Nadia, 2021). Artinya sebanyak 88,07% pemerintah daerah yang belum mandiri. Sementara itu hanya 10 dari 503 pemerintah daerah yang sudah masuk dalam kategori mandiri, artinya hanya 2% jumlah pemerintah daerah yang mandiri secara keuangan

Tabel 1. Daftar Daerah dengan Tingkat Kemandirian Terendah di Sumatera Barat Tahun 2021

No	Nama Kab/Kota	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Tingkat Kemandirian
1	Kab. Kepulauan Mentawai	2021	30,18	817,64	4%
2	Kab. Pesisir Selatan	2021	208,54	4101,56	5%
3	Kab. Solok	2021	68,27	1169,22	6%
4	Kota Pariaman	2021	38,03	613,25	6%
5	Kab. Lima Puluh Kota	2021	79,85	1260,79	6%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (Diolah, 2022)

bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di beberapa kabupaten/kota

di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 masih jauh dari yang diharapkan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian terendah adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4%. Selanjutnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5%, kemudian kabupaten Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang masing-masing di angka 6%. Artinya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam kategori rendah sekali (BPS, 2020). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Elemen utama agar terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri secara keuangan adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (Saraswati & Nurharjaranti, 2021), (Rivandi & Novriani, 2021). Komposisi pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan suatu indikator untuk menilai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Insukindro, et al., 1994). Semakin kecil kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD maka akan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian pemerintah daerah adalah belanja modal. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam mengatur anggaran belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang didalamnya termasuk belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk memperoleh asset dengan masa manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal diharapkan

dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Ariani & Putri, 2016), (Muhammad & Ivandri, 2021). Peningkatan belanja daerah yang tidak sejalan dengan PAD akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kemandirian pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena bantuan dari pemerintah pusat akan berkontribusi dalam membiayai belanja modal (Rivandi & Pramudia, 2022), (Rivandi & Lestari, 2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Malau & Parapat (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Peneliti mengambil objek penelitian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di bagian barat pulau Sumatera dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5,5 juta jiwa dengan luas wilayah 42 ribu Km². Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak destinasi wisata alam, mulai dari gunung, pantai, pulau danau dan perkebunan. Hal ini yang menjadikan Provinsi Sumatera Barat potensial dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi destinasi objek wisata.

LANDASAN TEORI

Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan mata uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah Mamesah dalam Halim, A. (2007). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sendiri pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya dalam rangka prinsip desentralisasi, dan membangun pemerintahan daerah sendiri.

Sumber penerimaan pemerintah daerah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Penerimaan internal seperti PAD,

dan penerimaan eksternal seperti Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman. Semakin tinggi penerimaan daerah berupa PAD, maka pemerintah daerah semakin rendah tingkat ketergantungannya pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga dikatakan mempunyai kemandirian yang tinggi. Formula untuk menentukan rasio kemandirian ini adalah seperti berikut ini (Saraswati & Nurharjaranti, 2021):

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah (UU Nomor 33 tahun 2004). Pendapatan daerah berfungsi untuk menunjang pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan terkait menjalankan roda pemerintahannya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari retribusi daerah, dan juga pajak daerah, serta hasil dari pengelolaan kekayaan yang mana lebih dipisahkan oleh daerah, serta PAD yang sudah sah menurut aturan. Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus (Saraswati & Nurharjaranti, 2021):

$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja aset yang memiliki umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan berguna untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Menurut Halim (2008) Belanja modal adalah pembelian aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sementara berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan anggaran belanja dalam perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memiliki umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Metode perhitungan belanja modal yaitu belanja tanah ditambah belanja gedung dan bangunan, ditambah belanja jalan dan irigasi, ditambah belanja aset tetap lainnya. Indikator variabel belanja modal diukur dengan (Saraswati & Nurharjaranti, 2021):

$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah merupakan total pendapatan yang mampu diperoleh oleh daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah berfungsi untuk menunjang pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan terkait menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pengaplikasiannya melalui kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dari Machfud, Asnawi, & Naz'aina (2020) terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya, setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan menyebabkan peningkatan juga terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Kenaikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah disebabkan karena meningkatkan jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai anggaran belanja daerah.

Selanjutnya, penelitian Fitriyani & Suwarno (2021) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan dapat membiayai belanja daerah nya sendiri, sehingga ketergantungan

terhadap dana dari pemerintah pusat akan menurun.

Selain itu, penelitian Nasution, Handoko, & Pohan (2018) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan indikator dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, apabila tingkat kontribusi PAD dominan, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri secara finansial.

Kemudian, hasil penelitian Malau & Parapat (2020) membuktikan bahwa variabel Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori signalling yang memberitahukan bahwa ketika pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka hal ini sebagai capaian dari peningkatan kemandirian keuangan daerah.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja Modal merupakan pengalokasian anggaran dalam rangka memperoleh asset tetap atau asset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Penggolongan belanja modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Besaran anggaran pengalokasian belanja modal ini dikembalikan ke daerah masing-masing. Apabila daerah memiliki pendapatan asli yang besar, maka daerah tersebut kemungkinan telah mandiri secara finansial dan akan menyusun alokasi

anggaran untuk belanja modal yang lebih besar.

Peningkatan belanja modal yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah akan menyebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja modal. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah menjadi ketergantungan kepada bantuan dana dari pemerintah pusat dalam membiayai belanja modal.

Penelitian dari Marselina & Herianti, (2022) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Maksudnya adalah peningkatan belanja modal akan mengakibatkan penurunan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Apabila anggaran belanja modal suatu daerah besar dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan dibiayai oleh dana alokasi umum yang bersumber dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, Penelitian Imawan & Wahyudin (2014) menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan penganggaran belanja modal tidak selamanya diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Akibatnya belanja modal yang telah dianggarkan sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dinilai belum bisa mandiri secara finansial.

Selain itu, penelitian Fitriyani & Suwarno (2021) menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, apabila terdapat kenaikan pada belanja daerah maka akan terdapat penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah, begitupula sebaliknya. Hal ini dikarenakan peningkatan anggaran belanja daerah tidak selamanya diimbangi oleh peningkatan pendapatan asli daerah sehingga

daerah sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai belanja modal.

Sementara itu, penelitian dari Saraswati & Nurharjaranti (2021) mendapatkan hasil yang kontra dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian Saraswati & Nurharjaranti (2021) membuktikan bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya peningkatan belanja modal tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diduga karena ketidaktepatan dalam pengalokasian belanja modal sehingga bersifat konsumtif dan menurunkan produktifitas dalam penyaluran dana belanja modal ini.

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi dalam masyarakat berhubungan satu sama lain dan di deskripsikan dalam bentuk data statistik (Martono, 2015).

Objek Penelitian

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dan diproses melalui akun Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan dan Belanja Modal pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2021.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, artinya keseluruhan populasi pada penelitian ini akan dijadikan sampel penelitian.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini termasuk kedalam golongan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data skunder yang didapat dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dengan teknik dokumentasi

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melakukan semua pengujian hipotesis. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis Data Panel dalam tahunan. Model regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

$Y =$ Kemandirian Keuangan Daerah

$\alpha =$ Konstanta

$\beta_{1,2,3,4} =$ Koefisien regresi dari variabel independen

$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah

$X_2 =$ Belanja Modal

$e =$ Epsilon

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Uji Kelayakan Model

Memilih model penelitian yang paling tepat diantara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM) dengan patokan hasil uji *chow* dan uji *hausman*.

a. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk memilih model yang akan digunakan antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika pada *Cross-section Chi-square* lebih kecil dari *alpha* (α) ($0,0000 < 0,05$), maka H_0 ditolak artinya model *Fixed Effect* lebih baik

digunakan dari pada model *Common Effect*

Tabel 2. Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	214,32459 2	17	0,0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views10 2022

Berdasarkan tabel hasil *Chow Test* pada dua model penelitian diatas dengan menggunakan Eviews 10, didapat probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka H_a untuk model ini diterima dan H_0 ditolak, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, sehingga dilanjutkan ke *Hausman Test*.

b. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model *fixed effect model* atau model *random effect model* yang tepat digunakan sebagai model regresi data panel.

Jika probabilitas $< 0,05$ maka digunakan *fixed effect model* Jika probabilitas $> 0,05$ maka digunakan *random effect model*

Tabel 3. Hasil Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14,872723	2	0,0006

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views10 2022

Berdasarkan tabel hasil *Hausman Test* pada dua model penelitian diatas dengan menggunakan Eviews 10, didapat probabilitas sebesar 0,0006. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka dapat diputuskan bahwa penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,030002	0,005150	5,825471	0,0000
PAD	0,000835	0,000056	14,89521	0,0000
BELANJA_MODAL	-0,000051	0,000018	-2,804415	0,0062

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views10 2022

Berdasarkan Tabel di atas, persamaan regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,030002 + 0,000835 - 0,000051$$

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,0300, hal ini memiliki makna bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dianggap konstan (0), maka kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 0,0300.
- 2) Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (β_1) bernilai positif sebesar 0,0008. Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1, akan menaikkan kemandirian keuangan daerah sebesar Rp. 0,0008.
- 3) Koefisien regresi variabel Belanja Modal (β_2) bernilai negative sebesar -0,000051. Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1, akan menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar Rp. 0,000051.

Uji Model Regresi Data Panel

Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent secara

parsial terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (uji t)

Variabel	Prob.	d.f	Keterangan
C	0,0000		
PAD	0,0000	H1	Diterima
Belanja Modal	0,0062	H2	Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views10 2022

- Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Diketahui nilai t sebesar 14,89521 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,000835 dengan nilai prob. 0,000. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai prob. $< \alpha$ (0,05), yaitu $0,00 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
- Hipotesis kedua menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Diketahui nilai t sebesar -2,804415 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,000051 dengan nilai sig. 0,0062. Hal ini berarti Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai sig. $< \alpha$ (0,05), yaitu $0,0062 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Apabila pada hasil pengujian memperoleh nilai R^2 yang mendekati angka satu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan variabel dependennya. Namun, apabila pada hasil pengujian memperoleh nilai R^2 yang mendekati angka nol, dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan yang sangat bagus untuk menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

N	R-Squared	Adj. R-Squared
106	0,932636	0,917753

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views10 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada table 4.13 didapatkan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,917753. Maknanya adalah variable Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh kepada variable Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 91,77%. Sedangkan sisanya sebesar 8,23% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan uji statistic dengan menggunakan regresi data panel didapatkan hasil bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang signifikan dalam pergerakan tingkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan elemen utama dalam penguatan kapasitas fiskal daerah yang

merupakan tujuan dari ditetapkannya system otonomi daerah (Saraswati & Nurharjaranti, 2021). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan pemerintah dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pada daerah mereka sendiri. Potensi-potensi ini yang nantinya harus dikelola secara efektif dan efisien agar hasil yang dicapai dapat maksimal.

Teori Desentralisasi Fiskal menjelaskan bahwa pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik (Rante, Mire, & Paminto, 2017). Berdasarkan teori ini, Pemerintah daerah harus mengembangkan potensi-potensi pendapatan asli daerah berupa pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan daerahnya. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengelola sumber daya alam atau potensi lainnya di daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data statistik yang di dapat pada penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah rata-rata sebesar 0,092 atau 9,2%. Hal ini sangat jauh dari yang di harapkan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu mandiri secara finansial apabila kontribusi PAD > 50% terhadap total pendapatan yang mereka terima. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi pendapatan asli daerah yang bisa mereka capai.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan uji statistic dengan menggunakan regresi data panel didapatkan hasil bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa

Belanja Modal memiliki kontribusi yang signifikan dan negatif dalam pergerakan tingkan kemandirian keuangan daerah. Maksud dari hasil statistic ini adalah peningkatan belanja modal yang dialami oleh pemerintah daerah akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan pada daerah tersebut.

Setiap kenaikan Belanja Modal akan menyebabkan penurunan pada Kemandirian Keuangan Daerah. Apabila anggaran belanja modal suatu daerah besar dan tidak dimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan dibiayai oleh dana alokasi umum yang bersumber dari pemerintah pusat. Hal inilah yang akan menyebabkan pemerintah daerah ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan tidak bisa mandiri secara finansial.

Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework (MTEF)*, kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengalokasian asset tersebut dalam jangka panjang (Karyadi, 2017). Berdasarkan Teori ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan penganggaran yang optimal sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penganggaran. Dalam menganggarkan belanja modal, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah nya. Hal ini akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut, karena apabila kemampuan keuangan daerah tidak mampu untuk membiayai belanja modal, maka pemerintah daerah akan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Akibatnya kemandirian keuangan daerah tidak bisa tercapai.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Hipotesis pertama diterima, yaitu variable Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap variable kemandirian keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang dicapai oleh pemerintah daerah akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan di daerah tersebut.
2. Hipotesis kedua diterima, yaitu variable Belanja Modal terbukti berpengaruh signifikan dan negative terhadap variable kemandirian keuangan daerah. Maknanya adalah setiap kenaikan Belanja Daerah akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Keterbatasan

Peneliti telah berusaha untuk mendesain penelitian ini sebaik mungkin, namun masih terdapat keterbatasan dalam menyelesaikan penelitian ini. Keterbatasan yang masih perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang didapatkan dari *website* www.djpk.kemenkeu.go.id sehingga tidak melibatkan faktor-faktor variabel *cross-section* seperti perilaku Pemerintah Daerah dan perubahan regulasi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan pengamatan dengan rentang waktu selama tiga tahun yaitu 2016-2021.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggali potensi daerahnya seperti intensifikasi penerimaan pajak daerah dan meminimalisir penggunaan dana perimbangan sehingga terciptanya daerah otonom yang mandiri.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memasukkan variabel *crosssection* seperti perilaku pemerintah daerah dan perubahan regulasi.

DAFTAR PUSATAKA

- [1] Abdullah, S., & Asmara, J. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9*, 23-26.
- [2] Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting Feb UMS*.
- [3] Armawaddin, M, R., & Alfiat, M. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 77-91.
- [4] Bps. (2020). *Tingkat Kemandirian Kabupaten Kota*. Retrieved From Sirusa Badan Pusat Statistik: <https://Sirusa.Bps.Go.Id/Sirusa/Index.Php/Indikator/928>
- [5] Cahyani, D. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- [6] Cintya, U. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016.
- [7] Darwis, E. T. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- [8] Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 107-119.
- [9] Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *E-Proceeding Of Management*.

- [10] Fitriyani, E. N., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding Senapan*, 61-69.
- [11] Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Dan Spss*. Semarang: Bp Universitas Diponegoro.
- [12] Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Ikasari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas Pgrri Yogyakarta*.
- [15] Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*.
- [16] Insukindro, M., Wahyu Widayat, Jaya, W. K., Purwanto, Halim, A., Suprihanto, J., & Purnomo, B. (1994). *Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pad*. Yogyakarta: Fe UGM.
- [17] Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. *Jurnal Profita*.
- [18] Keuangan, D. J. (2021, Mei 23). *Portal Data*. Retrieved From Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan: [Www.Djpk.Go.Id](http://www.djpk.go.id)
- [19] Latif, A., Rikie, Anndriyana, Y., Kuswanto, Rosada, H., Maulana, A. C., & Hasbi. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
- [20] Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*.
- [21] Malau, E. I., & Parapat, E. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ek&Bi*, 332-337.
- [22] Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 110-118.
- [23] Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- [24] Nadia. (2021, September 06). *Pemda Harus Berinovasi Untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah*. Retrieved From Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
- [25] <https://www.dpr.go.id/Berita/Detail/Id/34485/T/Pemda+Harus+Berinovasi+Untuk+Wujudkan+Kemandirian+Fiskal+Daerah>
- [26] Narhatyo, E., & Utami, I. (2019). *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks Jakarta.
- [27] Nasution, A. P., Handoko, B., & Pohan, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 192-206.
- [28] *Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004*.
- [29] Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *Inovasi*, 78-89.
- [30] Rivandi, Muhammad, & Ivandri, P. T. (2021). Pengaruh EPS , ROA dan ROE Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi (JEBMA)*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.47709/jebma.v1i2.978>
- [31] Rivandi, M., & Lestari, N. H. (2022). Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 79–94. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5956>
- [32] Rivandi, M., & Novriani. (2021). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pundi*, 05(01), 139–152. <https://doi.org/10.31575/jp.v5i1.315>
- [33] Rivandi, M., & Pramudia, M. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 255–269. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.228>
- [34] Sahya, A. (2012). *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- [35] Saraswati, N. P., & Nurharjaranti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 51-64.
- [36] Sari, S. M. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah Di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2018.
- [37] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [38] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [39] Utami, B. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- [40] *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- [41] *UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- [42] *UU Nomor 33 Tahun 2004*.
- [43] Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN